

Nomor : 166/DIR/BPR-KK/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) Bundel

Kota Wisata, 26 April 2022

Kepada Yth,
DPP PERBARINDO
Komplek Patra II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass
Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola BPR Karunia Kanaka Periode Tahun 2021.

Dengan Hormat,
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020 dan paling sedikit kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Asosiasi BPR di Indonesia
- c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
- d. *Homepage* BPR bagi yang telah memiliki situs WEB

Bersama ini kami sampaikan Laporan mengenai Tata Kelola BPR Karunia Kanaka Periode Tahun 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT.BPR Karunia Kanaka



Jeffrey N. ...
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur Bogor

Nomor Telepon : 2184931416

Penjelasan Umum : BPR Karunia Kanaka menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain: Meningkatkan kinerja BPR Karunia Kanaka dengan menyelaraskan segala kegiatan BPR sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Strategi usaha yang telah ditetapkan oleh BPR Karunia Kanaka, Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Pemegang Saham(Shareholders) dan pemangku kepentingan(Stakeholders), Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, Menjaga agar kegiatan operasional BPR Karunia Kanaka mematuhi peraturan internal dan eksternal serta perundangan yang berlaku, Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR Karunia Kanaka, Memperbaiki Budaya Kerja BPR Karunia Kanaka, Mengelola sumber daya BPR Karunia Kanaka secara lebih tertata dan produktif, Mendorong dan mendukung pengembangan BPR Karunia Kanaka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Kepengurusan BPR Karunia Kanaka; Mengelola BPR Karunia Kanaka sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR Karunia Kanaka dan Peraturan perundang-undangan antara lain: Mengimpun dana, Menyalurkan Kredit, Menempatkan dana pada pihak lain, Menerima penempatan dana dari bank lain, Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank; Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Karunia Kanaka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Karunia Kanaka, auditor, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas lainnya; Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; Mempertanggungjawabkan pelaksanaab tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Mengungkapkan kebijakan BPR Karunia Kanaka yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Lisana, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR Karunia Kanaka; Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi APU PPT; Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Melihat NPL per posisi 31 Desember 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Direksi telah mengupayakan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA dengan cara melakukan Lelang Agunan, Penjualan Jaminan atau melakukan Take Over ke Bank lain; Melakukan relaksasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19; Direksi telah menindaklanjuti temuan dari Audit Intern, Audit Ekstern (KAP), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil pengawasan dari Dewan Komisaris; Penerapan Kepatuhan, APU PT dan Manajemen Risiko telah dijalankan dengan baik sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan telah disesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi Kepada Direksi			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lisana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lisana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1				

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1				

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	502800000	2	292939929
2	Tunjangan	2	140400000	2	58975800
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	74550000	2	49728023
	Total		717750000		401643752

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dan Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka mendapatkan Gaji Pokok beserta tunjangan dan Remunerasi lainnya berupa THR dan uang cuti akan tetapi tidak mendapatkan Tantiem itu dikarenakan selama tahun 2021 BPR Karunia Kanaka mengalami kerugian sehingga tidak ada pembagian bonus tahunan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak diberikan Fasilitas Perumahan karena lokasi tempat tinggal Direksi berada di kota/Kabupaten yang berdekatan dengan BPR Karunia Kanaka.	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak diberikan Fasilitas Perumahan karena lokasi tempat tinggal Dewan Komisaris berada di kota/Kabupaten yang berdekatan dengan lokasi BPR Karunia Kanaka
2	Transportasi	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas Kendaraan operasional yang meliputi BBM, E-toll serta service pemeliharaan kendaraan operasional.	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak diberikan Fasilitas transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Rawat inap dan rawat jalan) dan Fasilitas rawat jalan dengan sistem Reimburse dengan plafond sebesar Rp. 7,500,000 per tahun	Dewan Komisaris BPR Karunia mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Rawat inap dan rawat jalan) dan fasilitas rawat jalan dengan sistem Reimburse dengan total plafond sebesar Rp. 4,500,000 per tahun
4	Fasilitas lainnya	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas lain berupa Transportasi, Asuransi Kesehatan dan Fasilitas Lainnya berupa BPJS Ketenagakerjaan seperti yang tercantum diatas akan tetapi berbeda dengan Dewan Komisaris di BPR karunia Kanaka hanya mendapatkan fasilitas lainnya yaitu berupa Asuransi Kesehatan dan Asuransi Ketenagakerjaan saja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,90	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,91	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,18	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,22	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,77	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ratio gaji diatas adalah yang diterima oleh seluruh Karyawan dan pengurus BPR Karunia Kanaka yang dihitung dari Gaji Pokok beserta Tunjangan dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-01-2021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR Karunia Kanaka tahun 2020, Evaluasi Realisasi Rencana Strategis Direksi tahun 2020; Penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka
2	03-03-2021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR Karunia Kanaka di bulan Januari 2021; Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka
3	28-04-2021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR Karunia Kanaka di Bulan Maret (Triwulan I); Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko BPR Karunia Kanaka.
4	28-06-2021	2	Revisi Rencana Bisnis PT. BPR Karunia Kanaka tahun 2021; Strategi yang diterapkan oleh Direksi sampai dengan akhir Desember 2021.
5	02-08-2021	2	Evaluasi Kinerja PT. BPR Karunia Kanaka bulan Juni (Triwulan II); Strategi-strategi Direksi yang telah dilaksanakan sampai dengan Juni 2021 (Triwulan II) dan strategi yang akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka selalu melaksanakan Rapat Dewan Komisaris minimal dalam 1 tahun dilaksanakan 3 kali, akan tetapi per Posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia tidak memiliki Komisaris (kosong) akan tetapi telah di daftarkan Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Rapat Dewan Komisaris yang tercantum adalah Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris yang lama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1				

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyimpangan Internal/Fraud tidak terjadi di BPR Karunia Kanaka selama tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Karunia Kanaka selama tahun 2021 tidak mempunyai permasalahan hukum baik secara Perdata maupun secara Pidana

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Bapak Jemmy Hendra Uisan	Pemegang Saham Pengendali	Bapak Jeffrey Nathanael Odiwijaja	Direktur Utama	Sewa gedung Kantor Pusat BPR Karunia Kanaka kepada adik PSP yaitu Sdr Nona Thresia Titiliany Uisan	18.000	Sewa gedung tersebut untuk jangka waktu 3 tahun (36 bulan)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sebelum dilakukan Perjanjian Sewa Menyewa kembali, BPR Karunia Kanaka telah melakukan perbandingan harga sewa disekitar ruko sesuai dengan 5 Pilar T.A.R.I.F (Transparansi, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness). Adapun harga sewa Ruko tersebut adalah sesuai nilai pasar yang wajar dan telah diadministrasikan dengan baik di BPR Karunia Kanaka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	: PT BPR Karunia Kanaka
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur Bogor
Nomor Telepon	: 2184931416
Modal Inti BPR	: 6.150.441.000,00
Total Aset BPR	: 74.231.549.333,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,3
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sudah dilakukan secara independent, sehingga segala keputusan yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan, Direksi dan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Tertib yang mengatur tentang Etika dalam bekerja, Waktu kerja dan peraturan rapat dan semua itu telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Tidak adanya rangkap jabatan di BPR Karunia Kanaka semuanya berjalan sesuai fungsinya, dan Direksi selalu menindak lanjuti adanya temuan dari audit internal maupun audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan. BPR Karunia Kanaka telah memiliki SPO mengenai Benturan Kepentingan dan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dari Level Manajemen (Direksi dan Komisaris) sampai ke level Non Staf (Office Boy, Supir dan Satpam).BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti dibawah Rp. 50 M, sehingga menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan penerapan Audit Internal, Audit Internal melaksanakan tugasnya secara independent dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka, karena Aset BPR Karunia Kanaka masih dibawah Rp. 50 M maka ditunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggung jawa atas pelaksanaan Manajemen Risiko di B PR Karunia Kanaka. BPR Karunia Kanaka telah memiliki SPO mengenai Manajemen Risiko dan telah pelaksanaannya diawasi oleh Komisaris dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Strategis BPR Karunia Kanaka sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan di BPR Karunia Kanaka sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan keuangan per tiga bulan sekali ataupun 1 tahun sekali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,50	0,10	1,10	0.220	Jumlah, Komposisi, integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	2,11	2,00	0,50	4,61	0.692	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi, untuk posisi 31 Desember 2021 posisi Komisaris di BPR Karunia Kanaka sedang kosong, dan sedang diusulkan Ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu atas nama Bapak H. Bambang Setiawan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Karunia Kanaka mempunyai Aset dibawah Rp. 50 M, sehingga belum diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Tidak terdapat Benturan Kepentingan di BPR Karunia Kanaka
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,80	0,20	1,70	0.170	Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR Karunia Kanaka telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan telah menjalankan fungsinya secara independent
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR Karunia Kanaka telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (Risk Based Audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independent
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independent dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	1,32	0,10	3,09	0.309	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun penetapan limit risiko dan pemantauan profil risiko belum dijalankan dengan baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,25	1,15	0.086	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,67	0,80	0,20	1,67	0.125	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	2,50	0,80	0,15	3,45	0.259	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan
Nilai Komposit						2.3	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pengangkatan Direktur Kepatuhan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP: 144/KR.02/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan telah di sahkan oleh RUPS dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Dhyah Madya Ruth S.N,S.H,M.Kn
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Domisili Direksi PT. BPR Karunia Kanaka telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud yakni bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan Direktur Utama BPR Karunia Kanaka bertempat tinggal di perbatasan Kota/Kabupaten di Lokasi Kantor BPR Karunia Kanaka
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi BPR Karunia Kanaka sejak awal beroperasi tidak ada yang melakukan rangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka sejak awal beroperasi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi BPR Karunia Kanaka telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta Notaris No. 01 Juli tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris H. Fedris, S.H
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Rapat Direksi BPR Karunia Kanaka yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak menggunakan BPR untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka memandang bahwa SDM adalah Aset perusahaan yang perlu ditumbuhkembangkan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi BPR Karunia Kanaka mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk menjaga NPL
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah memiliki Tata Tertib Direksi dengan No. 015/SK.DIR/BPR-KK/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dan melaksanakannya dengan baik
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka senantiasa mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka senantiasa mendokumentasikan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam Rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka selalu memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada pegawai menjadikan SDM lebih memahami tugas dan tanggung jawab sesuai bidang kerjanya
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	5	Sejak Oktober 2021 BPR Karunia Kanaka sedang dalam proses Akuisisi, sehingga terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka jumlah Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka berjumlah 2 orang pada posisi 31 Oktober 2021 tetapi terdapat perubahan pada November 2021 hanya ada 1 Komisaris Utama dan 1 calon komisaris sehingga Per posisi Desember 2021 sudah ada 1 calon komisaris akan tetapi belum menerima Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki Komisaris (kosong).
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Karunia Kanaka kurang dari Rp. 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/SK.DIR/BPR-KK/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per Posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu proses persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per Posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu proses persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	5	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per Posisi 31 Desember 2021 tidak ada (kosong), akan tetapi sudah ada Calon Komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu proses persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	Total nilai skala penerapan	38	
	Rata-rata	4,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,11	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	5	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	5	Sebagaimana fungsi dari Komisaris adalah mengawasi, memberikan arahan, memantau maupun mengevaluasi tanpa turut serta didalam operasional BPR, telah dilakukan dengan baik, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	5	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, sehingga harmonisasi kerja terjaga, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	5	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi BPR Karunia Kanaka menindaklanjuti seluruh temuan Audit Internal, Audit Eksternal serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan Otoritas lainnya, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka selalu menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	5	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	5	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Karunia Kanaka untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil keuntungan dari BPR Karunia Kanaka, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	5	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Total nilai skala penerapan	40	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	2,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, akan tetapi posisi 31 Desember 2021 BPR Karunia Kanaka tidak memiliki anggota Komisaris akan tetapi sudah ada calon komisaris yang sedang dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,50	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite lainnya
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit Intern
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Pemantau Risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko lainnya
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR Karunia Kanaka telah memiliki Prosedur mengenai benturan kepentingan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomer 004/SK/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Telah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Telah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR Karunia Kanaka memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR Karunia Kanaka memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independent terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 05/SK.DIR/BPR.KK/III/2017
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memiliki Jobdesc menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu memastikan BPR Karunia Kanaka telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan di BPR Karunia Kanaka
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu memantau dan menjaga kepatuhan BPR Karunia Kanaka terhadap seluruh Komitmen yang dibuat
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Karunia Kanaka sesuai dengan ketentuan dari OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Karunia Kanaka agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Sesuai dengan target BPR Karunia Kanaka yaitu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Dilakukan secara triwulan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan apabila ada kebijakan yang menyimpang di BPR Karunia Kanaka
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sesuai dengan Modal Inti BPR Karunia Kanaka yang kurang dari Rp. 50 M maka BPR Karunia Kanaka telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	Audit Intern BPR Karunia Kanaka selalu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Audit Intern ataupun pelatihan lainnya guna menambah ilmu sehingga dapat diimplementasikan di BPR Karunia Kanaka
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR Karunia Kanaka telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga belum menugaskan pihak intern untuk mengkaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR Karunia Kanaka selalu melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit intern BPR Karunia Kanaka bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR Karunia Kanaka telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M dan telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada BPR Karunia Kanaka telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR Karunia Kanaka telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management Letter dari KAP telah menggambarkan permasalahan BPR Karunia Kanaka dan disampaikan secara tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit dari KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M, sehingga menunjuk salah satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK.DIR/BPR.KK/VII/2017
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR Karunia Kanaka telah memiliki Prosedur Manajemen Risiko akan tetapi belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR Karunia Kanaka belum memiliki prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	5	BPR Karunia Kanaka belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	5	BPR Karunia Kanaka belum menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah menerapkan Manajemen Risiko atas 3 Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	5	BPR Karunia Kanaka belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPR Karunia Kanaka telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	3,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,32	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR Karunia Kanaka telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah memberikan Laporan atas kredit kepada pihak terkait dan /atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ada beberapa debitur yang melampaui BMPK dan telah diberikan surat pemberitahuan dari BPR Karunia Kanaka agar segera melunasi seluruhnya atau melunasi sebagian

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	5	BPR Karunia Kanaka tidak memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah membuat Laporan publikasi setiap triwulan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah membuat Laporan publikasi setiap triwulan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat informasi umum, laporan keuangan dan informasi lainnya
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh salah satu Direksi dengan mencantumkan nama jelas
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

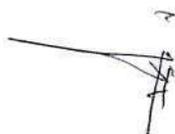
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR KARUNIA KANAKA

TAHUN 2021

Bogor, 18 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Jeffrey Nathanael
Direktur Utama



Drs. H. Bambang Setiawan
Komisaris

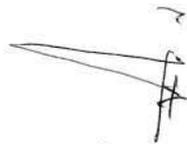
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : BPR Karunia Kanaka
Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur Bogor
No Telp : (021) 84931416
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 6.150.441.000,-
Total Aset : Rp. 74.231.549.333,-
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2.3
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

Seluruh Kebijakan yang ada di BPR Karunia Kanaka telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan dilakukan penyempurnaan secara terus menerus sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Bogor, 18 April 2022



Jeffrey Nathana
Direktur Utama



H. Bambang Setiawan
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Karunia Kanaka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495173-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600072-22042022085509

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

hamidah17karuniakanaka@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-22 08:55:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.